

EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA

Ni Kadek Ari Sintya Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta, Bali, Indonesia

e-mail: arisintyadw@gmail.com

Abstract: *The poverty is one of the problems that has become attention center of the government in any country. Bali government has been pursuing programs to alleviate poverty, one of them is Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). East Denpasar Subdistrict, Denpasar City is one of the regions that has implemented UPPKS program with the largest number of program participants in Denpasar City. The purpose of this study is to determine UPPKS program's effectiveness level and its impact on family income in East Denpasar Subdistrict, Denpasar City. Program's effectiveness is measured by input variables, process variables, and output variables. Input variables include: program socialization, assistance accuracition as needed, assistance punctuality, assistance amount accuracition, targets accuracition and returning assistance punctuality. Process variables include mentoring and evaluation / monitoring, while the output variable is participants program income. The analytical tool used in this study is descriptive statistics to determine the program's effectiveness and statistical analysis, namely the different test of the average pairing observation to determine the program's role in increasing income. The results of the analysis show that UPPKS program in East Denpasar Subdistrict, Denpasar City is very effective and the program's role in increasing income is significant at alpha 5 percent.*

Keywords: *Effectiveness, Impact, Income*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan keluarga Indonesia, kesejahteraan adalah cita-cita rakyat yang harus diperjuangkan bersama pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam menekan angka kelahiran telah memperoleh pujian internasional. Tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana membentuk keluarga kecil menjadi keluarga sejahtera yang dicita-citakan. Oleh karena itu, keluarga sebagai kesatuan inti masyarakat berperan dalam menentukan pembangunan nasional, sehingga perlu dikembangkan agar tumbuh menjadi keluarga sejahtera yang mandiri

dan tangguh, serta berperan sebagai sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi sesuai dengan amanat GBHN 1999 bertujuan tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi,

nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kondisi ini akan menjamin menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000:19). Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan menurut Hendriawan (Sudira, 2004:3) pendapatan dan konsumsi, namun juga terkait erat dengan pendidikan dan merupakan permasalahan kompleks, karena tidak saja berkaitan dengan rendahnya kesehatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi mutlak diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, karena aktivitas ekonomi merupakan daya ungkit universal dalam meningkatkan berbagai kegiatan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia selama ini telah mengupayakan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi daerah yang dimiliki. Di daerah Bali, masalah kemiskinan juga menjadi perhatian yang serius untuk

dientaskan oleh pemerintah daerah. Tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di beberapa kabupaten/kota menunjukkan, bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu dievaluasi. Untuk itu diperlukan program kerja yang lebih serius untuk mengentaskan kemiskinan. Kota Denpasar yang menjadi salah satu pusat perekonomian Bali juga tidak luput dari masalah kemiskinan. Pemerintah daerah Bali selama ini telah mengupayakan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, diantaranya adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Subsidi Langsung Tunai (SLT), dan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program UPPKS pada hakekatnya terkait dengan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi, sehingga dengan ketahanan dan kemampuan ekonomi yang semakin baik akan dapat meningkatkan kesehatan, pendidikan, serta kemampuan dan pengaturan tumbuh kembang anak. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan pemberdayaan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif yang dirintis oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui pemberdayaan usaha mikro yang berfungsi menggerakkan roda ekonomi rumah tangga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara menggugah minat peserta untuk berwirausaha. Sasaran dari program ini adalah terutama Keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, baik yang sudah menjadi akseptor KB, Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, pasangan muda serta anggota masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Peran kelompok UPPKS ini amat penting, karena merupakan wadah pembinaan dan pengembangan keluarga, khususnya dalam pengembangan fungsi ekonomi keluarga. Selain itu, kelompok UPPKS berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan semangat dan kemampuan berwirausaha, mengorganisasikan usaha-usaha ekonomi produktif, dan sebagai jalur penyaluran kredit yang meliputi Dana Bergulir, dana BUMN, Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), Kukesra Mandiri, dana Bantuan Sosial (Bansos) dari BKKBN serta kredit dari sumber-sumber yang terjangkau (BKKBN, 2007: 4). Untuk mengetahui perkembangan kelompok UPPKS dilaksanakan monitoring melalui sistem pencatatan dan pelaporan UPPKS dengan menggunakan formulir yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pembinaan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional yang berlaku. Denpasar merupakan salah satu kota yang melaksanakan program UPPKS. Program UPPKS cukup mendapat perhatian dari masyarakat Kota Denpasar yang ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan serta keberhasilan program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas dan dampak program UPPKS tersebut terhadap pendapatan

dengan menggunakan beberapa variabel sebagai ukuran keberhasilannya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas program UPPKS dan dampaknya terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Beberapa Konsep Tentang Kemiskinan

Berbagai definisi tentang kemiskinan sudah diberikan oleh para ahli di bidangnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan, yaitu seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan, baik tenaga mental maupun psikologisnya dalam upaya mempertahankan hidup kelompok tersebut (Marhaeni, 2007). Kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan rendahnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan (Mubyarto, 1998:4). Kualitas penduduk miskin jika dihubungkan dengan penghasilan yang diperoleh seperti lingkaran setan. Rendahnya kualitas penduduk miskin yang dicerminkan oleh rendahnya pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan penghasilan yang diterima juga rendah. Salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang

paling sah (*valid*) mengenai penduduk miskin adalah bahwasannya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional (Todaro, 2000:200). Pengertian kemiskinan itu sangat luas, dimana Arsyad (1997:70-71) mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi 2 macam: 1) kemiskinan absolut, yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin; 2) kemiskinan relatif, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal.

BKKBN membagi keluarga miskin menjadi dua, yaitu: 1) keluarga miskin sekali, yaitu keluarga yang karena alasan

ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, anggota memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian, bagian lantai terluas bukan tanah 2) keluarga miskin, yaitu keluarga karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu indikator yang meliputi: paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni (BKKBN, 2000:3).

Konsep Keluarga Sejahtera

Menurut Sekretariat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Pusat, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota dan antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan tahapan pencapaian keluarga sejahtera adalah sebagai berikut: 1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan agama, pangan, sandang dan kesehatan 2) Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya 3) Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) adalah

keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi 4) Keluarga Sejahtera Tahap III (KSIII) adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan, namun belum dapat memberikan sumbangan material terhadap masyarakat dan 5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS III⁺) adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangan, serta dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat (BKKBN, 1995:2).

Pengertian Kelompok UPPKS

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok kegiatan dari keluarga dalam wadah paguyuban keluarga sejahtera, melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga, beranggotakan keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan seterusnya baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Kegiatan UPPKS telah dimulai sejak tahun 1979 berdasarkan instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Nomor: 80/HK.011/E3/95 (BKKBN, 1995:1) Program ini pada mulanya dinamakan usaha peningkatan pendapatan keluarga

aksptor KB yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta ibu rumah tangga/ istri dalam mengisi waktu luangnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pada perkembangannya, ternyata telah terbukti dapat membina kemandirian dan peningkatan pendapatan keluarga, serta merupakan forum proses belajar peningkatan kemampuan dan keterampilan usaha ekonomi produktif keluarga. Dana bantuan modal usaha kelompok UPPKS dapat berasal dari berbagai sumber antara lain dari BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan untuk program ini dilakukan dengan mengoptimalkan dana yang telah terhimpun melalui kerjasama kemitraan, partisipasi masyarakat, dan instansi terkait yang disalurkan dengan sistem *channeling* dan *executing* melalui bank pelaksana, PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (BKKBN, 2007:4).

Pengertian Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam suatu perekonomian yang baik, yaitu perekonomian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan (Todaro, 2000:113). Pendapatan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan ekonomi masyarakat yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan suatu proses pembangunan. Pendapatan individu adalah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam

perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki dan juga sumber lain (Sukirno, 2000:43). Tujuan pokok pembangunan nasional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan atau kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga besar kecilnya pendapatan masyarakat dapat mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

Menurut Sukirno (2000:37), untuk menghitung besar kecilnya pendapatan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: 1) pendekatan produksi (*production approach*), yaitu dengan menghitung semua nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu; 2) pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu dengan menghitung nilai keseluruhan balas jasa yang dapat diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode tertentu dan 3) pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu pendapatan yang diperoleh dengan menghitung pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu dengan menghitung keseluruhan balas jasa yang dapat diterima oleh anggota kelompok UPPKS dari hasil usahanya dengan menggunakan bantuan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Efektivitas Program

Menurut Subagyo (2000:3), efektivitas adalah kesesuaian antara *output*

dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila realisasi program 1 persen sampai dengan 50 persen dari target termasuk efektivitas rendah, sedangkan apabila realisasi program antara 51 sampai dengan 100 persen dari target, termasuk efektivitas tinggi. Pengukuran tingkat efektivitas menggunakan standar sesuai acuan Litbang Depdagri Republik Indonesia 1991 (Prapta, 2007:28), sebagai berikut: 1) rasio efektivitas di bawah 40 persen = sangat tidak efektif; 2) rasio efektivitas antara 40-59,99 persen = tidak efektif; 3) rasio efektivitas antara 60-79,99 persen = cukup efektif dan 4) rasio efektivitas di atas 80 persen = sangat efektif. Tingkat efektivitas dapat dievaluasi dengan variabel *input*, variabel proses dan variabel *output*. Variabel *input* meliputi: sosialisasi program, ketepatan bantuan sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu pemberian bantuan, ketepatan jumlah bantuan, dan ketepatan sasaran. Variabel proses meliputi pendampingan, ketepatan waktu pengembalian bantuan dan evaluasi/*monitoring*, sedangkan variabel *output* yaitu pendapatan peserta program.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan memberi dasar yang kuat dalam penyajian materi, baik dari segi variabel maupun konsep umum yang dipakai. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aswitari (2007) dengan judul penelitian “Efektivitas Program Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Klungkung”. Pada penelitian Aswitari (2007) yang diteliti adalah mengenai efektivitas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap kelompok keluarga UPPKS di Kabupaten Klungkung dengan menggunakan 2 metode analisis, yaitu: 1) analisis matematika dan statistik sederhana; 2) analisis statistik uji beda rata-rata. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner dan metode pengamatan non perilaku. Dalam penelitian tersebut disebutkan, bahwa secara umum tingkat efektivitas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Klungkung adalah cukup efektif dan terjadi peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja keluarga sesudah mengikuti program UPPKS di Kabupaten Klungkung. Penelitian kedua dilakukan oleh Suweta (2003) dengan judul “Efektivitas Program Gianyar Sejahtera dalam Pengentasan Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Gianyar”. Hasil penelitian ini adalah sebanyak 82,86 persen responden telah berhasil entas ke tahapan yang lebih tinggi, di antaranya 62,90 persen naik ke KS I, 12,36 persen naik ke KS II dan 6,99 persen naik ke KS III. Dilihat dari tingkat pendapatan, ada peningkatan pendapatan yang cukup signifikan antara pendapatan yang diperoleh oleh responden sebelum dan sesudah menerima bantuan program, namun efektivitas dan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan tersebut

belum mampu sepenuhnya mengentaskan keluarga pra sejahtera yang mana 17,74 persen keluarga pra sejahtera belum dapat dientaskan dan 51,62 persen responden masih berada di garis kemiskinan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar adalah sangat efektif dan terjadi peningkatan pendapatan keluarga sesudah mengikuti program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah ekonomi pembangunan khususnya program pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan efektivitas program dan dampaknya terhadap pendapatan keluarga. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif dan statistik yaitu penelitian menjelaskan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan dampaknya terhadap pendapatan keluarga melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Denpasar Timur, karena dari jumlah peserta program UPPKS di Kota Denpasar, kelompok keluarga sejahtera yang mengikuti program UPPKS terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Timur. Ini berarti, bahwa program ini perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui kondisi pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut. Obyek penelitian ini adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirintis oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Jenis data menurut sifatnya adalah:

1) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2004:14). Data tersebut seperti, jumlah anggota kelompok program UPPKS dan pendapatan keluarga; 2) Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2004:13). Data tersebut seperti misalnya mengenai pendapat responden mengenai sosialisasi program, ketepatan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu pemberian bantuan, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu pengembalian bantuan, pendampingan, dan evaluasi/*monitoring*.

Jenis data menurut sumbernya adalah: 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diamati dari sumbernya serta memerlukan pengolahan lebih lanjut terhadap data tersebut, misalnya data mengenai pendapatan anggota dan pendapat anggota mengenai sosialisasi program, ketepatan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu pemberian bantuan, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu pengembalian bantuan, pendampingan, dan evaluasi/*monitoring*;

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain dan buku-buku atau publikasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti misalnya peserta program UPPKS di masing-masing desa/kelurahan yang didapat dari Kantor Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) Wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya yang terkait dengan variabel-variabel yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian; 2) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Denpasar Timur, seperti membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya program; 3) Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap responden untuk mendapat alasan yang sebenarnya dari responden dalam mengambil keputusan terkait dengan kegiatan usaha produktif yang dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok program UPPKS. Berdasarkan pendataan Kantor Keluarga Berencana (KB) Kota Denpasar diperoleh informasi, bahwa jumlah seluruh anggota kelompok UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur adalah 270 orang dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Populasi Peserta Program UPPKS Dirinci Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Timur (orang)

Desa/Kelurahan	Pra KS	KS I	KS II, KS III dan KS III ⁺	Jumlah
Kelurahan Penatih	-	6	103	109
Desa Penatih Dangin Puri	1	9	73	83
Kelurahan Kesiman	-	9	26	35
Kelurahan Sumerta	-	-	23	23
Desa Sumerta Kauh	-	10	10	20
Kecamatan Denpasar Timur	1	34	235	270

Sumber: Keluarga Berencana Kota Denpasar, 2009

Tabel 2. Jumlah Sampel Peserta Program UPPKS Dirinci Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Timur (orang)

No.	Desa/Kelurahan	Kelompok			Jumlah
		Pra KS	KS I	KS II, KS III dan KS III ⁺	
1	Kelurahan Penatih	-	2	27	30
2	Desa Penatih Dangin Puri	1	2	19	22
3	Kelurahan Kesiman	-	2	7	9
4	Kelurahan Sumerta	-	-	6	6
5	Desa Sumerta Kauh	-	3	3	6
Kecamatan Denpasar Timur		1	9	62	73

Sumber: Tabel 2, data diolah

Tabel 2 menampilkan jumlah sampel masing-masing kecamatan dan kelompok. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan (α) 10 persen (Aswitari, 2007:33). Selanjutnya pengambilan jumlah sampel penelitian di masing-masing kelompok dan desa/kelurahan ditentukan dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*, yakni stratanya berdasarkan tingkatan kelompok UPPKS.

Berdasarkan identifikasi variabel, selanjutnya diberikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi program adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada calon anggota penerima program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 2) Ketepatan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan adalah tepat/tidaknya jenis bantuan yang diberikan dikaitkan dengan kebutuhan

anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- 3) Ketepatan waktu pemberian bantuan adalah tepat/tidaknya pemberian bantuan program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 4) Ketepatan jumlah bantuan adalah tepat/tidaknya jumlah bantuan yang diberikan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 5) Ketepatan sasaran program adalah tepat/tidaknya pihak-pihak yang seharusnya menerima bantuan pada program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 6) Ketepatan waktu pengembalian bantuan adalah tepat/tidaknya waktu pengembalian dana bantuan oleh anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 7) Pendampingan adalah ada/tidaknya program pendampingan pada anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 8) Evaluasi/*monitoring* adalah ada/tidaknya evaluasi/*monitoring* terhadap kegiatan anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- 9) Pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diterima anggota program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan dampak program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur dipergunakan beberapa analisis, antara lain.

- 1) Untuk mengetahui efektivitas program UPPKS digunakan teknik analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi = pencapaian pelaksanaan program

Target = seluruh anggota kelompok yang mengikuti program
Pengukuran efektivitas dilakukan pada variabel sosialisasi program, ketepatan bantuan sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu pemberian bantuan, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pengembalian bantuan, pendampingan, evaluasi / monitoring, dan pendapatan anggota program.

- 2) Untuk menganalisis dampak program UPPKS terhadap pendapatan peserta program, dilakukan pengujian statistik, yaitu uji beda rata-rata pengamatan berpasangan (Wirawan, 2002:179) dengan menghitung nilai statistik (uji t). Pengujian secara statistik dilakukan dengan menggunakan taraf nyata (*level of significant*) sebesar 5 persen dengan kriteria uji satu sisi, yaitu sisi kanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 3 terlihat, bahwa dari 9 variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas program,

ternyata 7 variabel menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif, yaitu variabel sosialisasi program, ketepatan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan, ketepatan waktu pemberian bantuan, ketepatan sasaran program, pendampingan, evaluasi/monitoring dan pendapatan, sedangkan 1 variabel menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup efektif, yaitu variabel ketepatan

pengembalian bantuan dan 1 variabel yang menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tidak efektif, yaitu variabel kecukupan jumlah bantuan. Jadi, dari perhitungan kumulatif 9 variabel tersebut, tingkat efektivitas program UPPKS menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi (sangat efektif), yaitu sebesar 82,19 persen.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Tahun 2009

Variabel	Target (Orang)	Realisasi		Tingkat Efektivitas Program
		Orang	%	
<i>Variabel Input</i>				
1) Tingkat Sosialisasi Program	73	73	100	Sangat Efektif
2) Tingkat Ketepatan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Kebutuhan	73	64	87,67	Sangat Efektif
3) Tingkat Ketepatan Waktu Pemberian Bantuan	73	71	97,26	Sangat Efektif
4) Tingkat Kecukupan Jumlah Bantuan	73	6	8,22	Sangat Tidak Efektif
5) Tingkat Ketepatan Sasaran Program	73	73	100	Sangat Efektif
<i>Variabel Proses</i>				
1) Tingkat Pendampingan	73	63	86,30	Sangat Efektif
2) Tingkat Ketepatan Waktu Pengembalian Bantuan	73	55	75,34	Cukup Efektif
3) Tingkat Evaluasi/Monitoring	73	63	86,30	Sangat Efektif
<i>Variabel Output</i>				
1) Tingkat Pendapatan	73	72	98,63	Sangat Efektif
Rata-Rata	657	540	82,19	Sangat Efektif

Sumber: Data Primer, 2009 data diolah

Analisis Uji Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok Program UPPKS Sesudah Mengikuti Program

Untuk menguji apakah terdapat peningkatan pendapatan peserta program sesudah mengikuti program, dilakukan pengujian secara statistik, yaitu uji beda rata-rata pengamatan berpasangan. Taraf nyata yang digunakan, $\alpha = 5\% = 0,05$ sehingga nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,67. Jadi, daerah kritisnya adalah daerah di sebelah kanan $t_{tabel} = 1,67$. Hasil perhitungan nilai statistik uji jatuh pada daerah penolakan ($t_0 = 15,89 > t_{tabel}$), maka artinya terdapat peningkatan pendapatan peserta sesudah mengikuti program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab II, maka didapat simpulan sebagai berikut.

- 1) Tingkat efektivitas program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar adalah sangat efektif.
- 1) Terdapat peningkatan pendapatan peserta sesudah mengikuti program UPPKS di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Saran

Berdasarkan simpulan, selanjutnya dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Dari segi variabel *input*, disarankan agar jumlah bantuan yang diberikan lebih ditingkatkan, karena selama ini bantuan yang diterima oleh peserta masih dirasakan kurang memadai

untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Disarankan juga, agar penggunaan bantuan lebih tepat guna, yaitu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, maka katagori peserta yang menjadi sasaran program adalah terutama Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).

- 2) Dari segi variabel proses, pendampingan yang telah dilaksanakan selama ini perlu ditingkatkan karena masih terdapat peserta program yang belum pernah mendapat pendampingan dari petugas/penyuluh KB dan pendampingan tersebut sebaiknya terus dilanjutkan. Untuk memperlancar pengembalian bantuan, disarankan agar persyaratan untuk mendapat bantuan program dipermudah, salah satunya dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman, sehingga peserta tidak mengalami hambatan dalam pengembalian bantuan. Untuk evaluasi/monitoring yang telah dilaksanakan selama ini, perlu ditingkatkan, karena ternyata terdapat peserta yang belum pernah dimonitoring selama menjalankan usaha ekonomi produktif. Begitu pula dengan waktu evaluasi/monitoring juga perlu ditingkatkan, karena terdapat peserta yang mendapat monitoring hanya setiap 5 bulan sekali. Sebaiknya, evaluasi/monitoring dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali.
- 3) Dari segi variabel *output*, peningkatan pendapatan peserta sesudah

mengikuti program UPPKS yang sebagian besar antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 299.999,- sebaiknya ditingkatkan lagi hingga mencapai peningkatan antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- bahkan di atas Rp. 400.000,-. Upaya peningkatan pendapatan peserta dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan peserta melalui pendampingan, dimana petugas/penyuluh KB dapat memberikan pembinaan dan pelatihan, sehingga dapat lebih mengembangkan usaha ekonomi produktif lainnya. Upaya lainnya juga dapat dilakukan dengan mengutamakan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) sebagai sasaran program. Apabila sasaran program lebih tepat kepada Pra KS dan KS I yang memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan KS II, KS III dan KS III⁺, maka penggunaan bantuan juga akan lebih tepat, yaitu hanya untuk usaha ekonomi produktif, sehingga peningkatan pendapatan akan lebih mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Aswitari, Ni Luh Putu. 2007. Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Klungkung. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Denpasar.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1995. *Pengembangan Kelompok UPPKS Dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. BKKBN. Edisi Kedua. Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kegiatan Kelompok UPPKS*. BKKBN. Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2007. *Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok UPPKS : Komitmen BKKBN Selama 3 Dekade*. BKKBN. Jakarta.
- Keluarga Berencana Kota Denpasar. 2009. *Peserta Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera*. Kantor Keluarga Kota Denpasar. Denpasar.
- Marhaeni, Anak Agung Istri Ngurah. 2007. Evaluasi Kondisi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Karangasem. *Buletin Studi Ekonomi*. 12(3): 249.
- Mubyarto. 1998. *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.

- Prapta, Made. 2007. Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Dalam Penanggulangan Keluarga Fakir Miskin di Kota Denpasar. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Denpasar.
- Sudira, I Made. 2004. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan). *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Denpasar.
- Subagyo, Ahmad Wito. 2000. *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Wirawan, Nata. 2002. *Statistik 2 (Statistik Inferensia)*. Edisi Kedua. Keraras Emas. Denpasar.